

PENGARUH E-GOVERNMENT, GAJI DAN TUNJANGAN PNS, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEBAGAI PROBABILITAS TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA

Gilbert Pane, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone:
+622476486851

ABSTRACT

Corruption is a serious problem faced by many countries in the world. In Indonesia, corruption is included in the category of special crimes. Many ways have been taken by the government to eradicate corruption in Indonesia, but in fact there are still many corruption cases that occur and the perpetrators are state civil servants. Therefore, this research was conducted to see what variables could influence the occurrence of corrupt practices in Indonesia, such as e-Government, salaries and allowances for civil servants, and gross regional domestic product.

The population in this study are all provinces in Indonesia in 2021. The data used is secondary data in the form of the number of corruption cases that have occurred in each province in Indonesia in 2021. The hypothesis testing was carried out using the multiple linear regression method with the e-views application .

The results of the study show that e-Government has no effect on corruption, while salaries and allowances for civil servants and gross regional domestic product have a positive effect on corruption

Keywords: corruption, e-government, gross regional domestic product, salaries and allowance for civil servants.

PENDAHULUAN

Korupsi yang dilakukan secara masif tentu saja akan berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara. Banyak sekali kerugian yang bisa ditimbulkan dari praktik korupsi, seperti mangkraknya pembangunan nasional, menurunnya pendapatan negara dari pajak, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah merambat di segala sektor pemerintahan, di berbagai sektor pemerintahan itulah dapat ditemukan praktik korupsi, khususnya di sektor perekonomian.

Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Bentuk konkret dari pemerintah adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK, pembentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui adanya kenaikan gaji PNS, membuat e-Government dan masih banyak lagi langkah pemerintah dalam memerangi kasus korupsi di Indonesia.

Pada pasal 1 ayat 3 Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019, berbunyi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 menyatakan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langkah konkret pemerintah untuk dapat mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia adalah dengan adanya reformasi birokrasi yang tergabung dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disebut KemenPAN-RB. Kemenpan RB adalah kementerian yang ada di pemerintahan Indonesia yang mengatur mengenai pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Tujuan dibentuknya kementerian ini juga agar Aparatur Sipil Negara lebih berintegritas lagi dalam menjalankan tugasnya

dan mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih kental hingga saat ini, dan juga tujuannya agar dapat mewujudkan birokrasi yang bersih. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi. Pemerintah melihat selama ini masalah yang ada di masyarakat cenderung lama ditangani oleh pemerintah dikarenakan adanya birokrasi yang panjang sehingga tidak efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh masyarakat. KemenpanRB langsung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Wali Kota dan Bupati, serta kepada seluruh instansi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah melihat cukup banyak manfaat ketika melakukan penyederhanaan birokrasi seperti berkurangnya anggaran belanja pegawai, pelayan publik akan lebih efektif dan efisien, pengambilan keputusan yang relatif lebih cepat serta akan mempermudah investor jika ingin berinvestasi di Indonesia karena tidak membutuhkan proses yang panjang seperti sebelum adanya penyederhanaan birokrasi.

Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi adalah dengan menaikkan gaji aparatur sipil negara. Gaji aparatur sipil negara terdiri dari beberapa rincian, yaitu: Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan. Gaji pokok di dapat berdasarkan golongan dari pegawai tersebut, tunjangan kinerja didapatkan berdasarkan jabatan apa yang diduduki oleh pegawai tersebut dan tunjangan kemahalan didapatkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap daerah, sehingga tunjangan kemahalan yang didapatkan pegawai negeri sipil berbeda-beda setiap kota dan provinsi sesuai dengan jabatan yang diduduki oleh pegawai tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah juga membuat sistem yang dinamakan *Electronic-Government* (E-Government) untuk mencegah terjadinya korupsi pada sektor pemerintahan dan diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. E-Government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Adapun tujuan dari E-Government ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat terutama mempercepat dan mempermudah akses interaksi masyarakat, meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik, dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011. Riset Nugroho (2014), Kurnia et al. (2017) dan Simarmata (2017) menemukan bahwa penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan berperan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan pelayanan publik dan mengurangi praktik tindak pidana korupsi. Penggunaan e-Government diharapkan bisa mewadahi masyarakat terkait informasi yang akan mereka butuhkan atau biasa disebut *Government to Citizen* (G2C), bisa juga bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya yang biasa disebut *Government to Government* (G2G), dan juga bisa memfasilitasi informasi kepada pihak swasta atau biasa disebut *Government to Business* (G2B). Namun, persepektif lain menunjukkan bahwa adanya temuan kasus korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Government di Indonesia masih belum cukup efektif dalam mencegah praktik korupsi.

e-Government juga dibentuk pemerintah agar dapat menciptakan *good governance* dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Ada sedikit perbedaan antara *government* dan *governance*, dimana *government* lebih mengarah kepada instansi pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan, sedangkan *governance* adalah tahap dimana pengambilan keputusan diambil dan tahap dimana keputusan tersebut diwujudkan atau tidak.

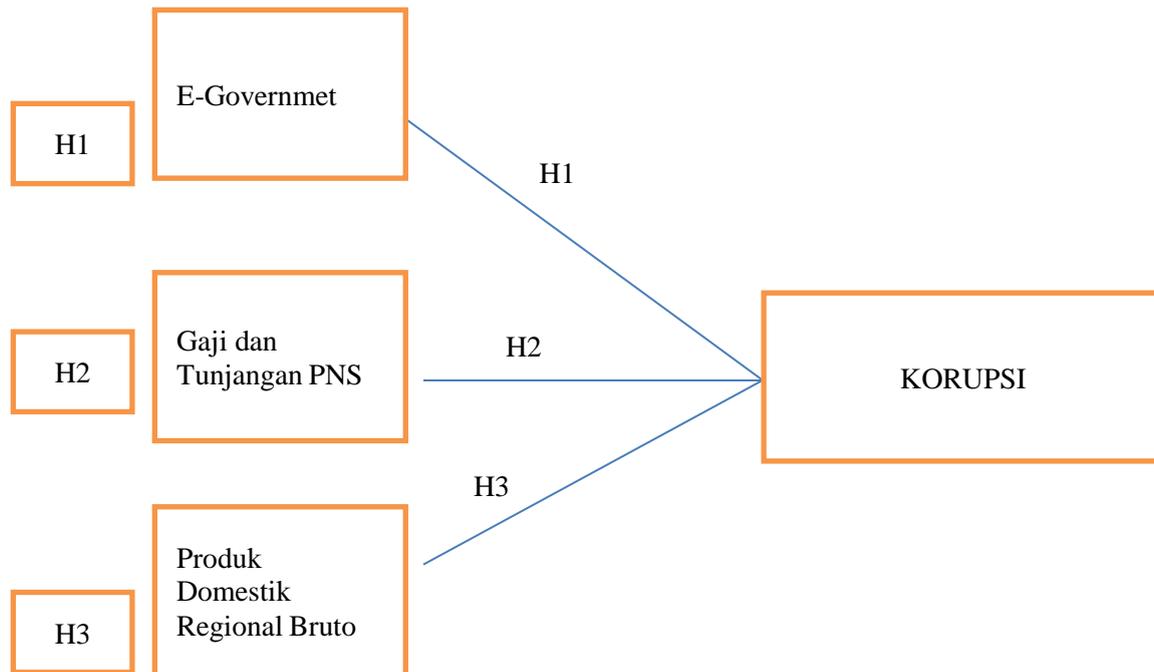
Good governance menurut Riswanda Imawan adalah bagaimana negara mengatur sektor ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat. Menurut Sedarmayati, *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang kemudian juga dikatakan sebagai administrasi pembangunan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Penelitian ini tentunya menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah korupsi, sedangkan variabel independennya adalah e-Government, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, serta produk domestik regional bruto.

Berdasarkan asumsi yang telah diuraikan, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



Pengaruh e-Government terhadap Korupsi

e-Government sangat vital keberadaannya dalam pemerintahan. Fungsi dari e-Government sendiri bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada pemerintahan. Menurut Tanzi (1998) kasus tindak pidana korupsi di negara berkembang lebih banyak jika dibandingkan dengan kasus tindak pidana korupsi pada negara maju, hal ini dikarenakan pengawasan di negara berkembang masih kurang memadai sehingga kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi terbuka lebar bagi para pejabat pemerintahan.

Dengan kehadiran dan penggunaan e-Government yang baik, dapat meminimalisir adanya tindak pidana korupsi dengan transparansi dan layanan pemerintah yang berbasis *online*. Hal kecil seperti misalnya laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) dari para pejabat pemerintahan bisa kita akses dengan mudah secara *online*. Selain itu, dengan adanya e-Government ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berapa besaran anggaran pemerintah dan bagaimana penyerapannya.

Tentunya dengan transparansi ini akan berefek terhadap pejabat pemerintahan tersebut, mereka tentunya akan berpikir berulang kali untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena akan sangat besar potensi untuk ketahuan jika mereka melakukannya. Di samping itu, efek yang ditimbulkan jika mereka melakukan tindak pidana korupsi juga sangat berdampak ke psikis para pejabat tersebut, selain sanksi hukum, sanksi sosial juga harus mereka hadapi karena perkembangan zaman saat ini semua hal dapat dengan mudah diakses secara *online*

H1: e-government berpengaruh signifikan terhadap korupsi

Pengaruh Gaji dan Tunjangan PNS terhadap Korupsi

Gaji pegawai negeri sipil (PNS) adalah uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai negeri sipil atas jasa yang diberikan. Besaran gaji ini diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. Terkait gaji pegawai negeri sipil (PNS) telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana berisi bahwa pemerintah wajib membayarkan gaji pegawai negeri sipil secara adil dan layak serta menjamin kesejahteraan pegawai negeri sipil. Kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) ini diberikan ketika sudah ada surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang tentunya sudah dipertimbangkan bersama Kementerian Keuangan (KemenKeu).

Meskipun naiknya gaji pegawai negeri sipil tidak terjadi setiap tahun, tetapi diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang bersih. Kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) ini tentunya diberikan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri sipil dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan adanya kenaikan gaji ini, diharapkan para pegawai negeri sipil (PNS) bisa lebih tercukupi kebutuhannya dan berdampak pada kurangnya niat para pegawai negeri sipil untuk melakukan tindak pidana korupsi.

H2: Gaji dan tunjangan PNS berpengaruh signifikan terhadap Korupsi.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Korupsi

Produk Domestik Regional Bruto atau yang biasa dikenal dengan PDRB adalah sebuah barometer penting untuk mengetahui tentang bagaimana perekonomian suatu daerah yang ruang lingkungannya Provinsi dan Kabupaten ataupun Kota. Produk domestik regional bruto sendiri mirip dengan produk domestik bruto, hanya saja berbeda skala, dimana PDB skalanya nasional, yaitu untuk mengukur kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu negara.

Setiap tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) selalu mengeluarkan data berapa besaran produk domestik regional bruto tiap provinsi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS terkait PDRB nantinya masyarakat bisa melihat bagaimana kondisi ekonomi dan pembangunan suatu daerah setiap tahunnya.

Pembangunan suatu daerah bisa terganggu karena adanya kasus korupsi yang terjadi di daerah tersebut yang dilakukan oleh pejabat daerah ataupun pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah tersebut. Masyarakat bisa melihat dan membandingkan angka PDRB yang dikeluarkan BPS setiap tahunnya dan membandingkan dengan berapa banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Hal itu juga bisa terlihat secara nyata, karena tidak jarang ada proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah tetapi tidak selesai atau mangkrak karena adanya kasus korupsi yang terjadi terkait proyek pembangunan tersebut. Tetapi, ada juga beberapa proyek pembangunan yang sudah direncanakan dan sudah ada anggarannya tetapi tidak dilaksanakan karena dana anggaran APBD yang dialokasikan untuk mengerjakan proyek tersebut telah di korupsi oleh aparatur sipil negara yang bertugas di wilayah tersebut.

H3: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Korupsi

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Terkandung dua jenis variabel yang dipergunakan penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Kinerja auditor menjadi satu-satunya variabel dependen penelitian ini. Kemudian pada variabel independennya yaitu terdapat independensi, profesionalisme, etika profesi, dan pemeriksaan jarak jauh. Penjelasan terkait masing-masing variabel dijabarkan tabel berikut.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
Korupsi (Y)	J Jumlah kasus korupsi di Pengadilan Tinggi tiap provinsi	Corrup
E-Government (X1)	Jumlah <i>website</i> Pemerintah Provinsi	e-Gov

Gaji dan Tunjangan PNS(X2)	Total gaji dan tunjangan yang diterima PNS	GT
Produk Domestik Regional Bruto (X3)	Jumlah PDRB tiap provinsi	PDRB

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2021.

Metode Analisis

Penggunaan eviews 10 berfungsi menjadi analisis data yang telah didapatkan. Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini. Model regresi ini menjadi teknik statistika yang berfungsi memahami pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Model regresi linier berganda penelitian ini dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Penjelasan:

- Y : Korupsi
- α : Konstanta
- X1 : e-Government
- X2 : Gaji dan Tunjangan PNS
- X3 : Produk Domestik Regional Bruto

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini melakukan uji pengaruh e-government, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan produk domestik regional bruto terhadap korupsi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Teknik yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 sampel

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Fungsi uji validitas ialah sebagai pengukuran kuesioner apakah tergolong valid atau tidak valid. Kriteria validnya item pernyataan penelitian ini ketika memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada signifikansi 5%. Nilai r_{tabel} diperoleh sebesar 0,349 berdasarkan *degree of freedom* (df) = 30 (32-2). Seluruh pernyataan pada kuesioner berjumlah 34 item telah dinyatakan **valid** berdasarkan uji validitas menggunakan *correlate product pearson moment* karena memiliki nilai $r_{hitung} > 0,349$.

Uji reliabilitas berfungsi untuk mengukur reliabel atau handalnya pada suatu kuesioner. Dikatakan reliabelnya sebuah data penelitian, apabila *Cronbach Alpha* (α) > 0,70. Nilai *Cronbach Alpha* (α) hasil pengujian melalui seluruh variabel penelitian ini melebihi angka 0,70. Maka dari itu disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian dapat dikatakan **reliabel**.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel berikut menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif yang berisi rentang teoritis atau rentang kemungkinan nilai. Kemudian terdapat rentang aktual yaitu berupa nilai minimum dan maksimum serta nilai standar deviasi dalam variabel penelitian.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Korupsi	34	0,69	3,04	1,4546	0,51069
E-gov	34	0,69	3,04	1,4546	0,51069
Gaji dan Tunjangan	34	15,95	17,99	16,8620	0,56038
PDRB	34	10,69	14,89	12,4314	1,13510
Valid N (listwise)	34				

Sumber: Data sekunder, diolah 2022

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4
Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.9746	114.0797	0.981548	0.3342
E_GOV	-0.589786	1.149280	-0.513179	0.6116
GAJI_DAN_TUNJANGAN	-20.56166	8.126889	-2.530077	0.0169
PDRB	23.34269	4.211210	5.542988	0.0000
R-squared	0.527503	Mean dependent var		52.55882
Adjusted R-squared	0.480253	S.D. dependent var		28.82464
S.E. of regression	20.78069	Akaike info criterion		9.016056
Sum squared resid	12955.11	Schwarz criterion		9.195628
Log likelihood	-149.2730	Hannan-Quinn criter.		9.077295
F-statistic	11.16415	Durbin-Watson stat		2.187281
Prob(F-statistic)	0.000044			

Tabel 5
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.9746	114.0797	0.981548	0.3342
E_GOV	-0.589786	1.149280	-0.513179	0.6116
GAJI_DAN_TUNJANGAN	-20.56166	8.126889	-2.530077	0.0169
PDRB	23.34269	4.211210	5.542988	0.0000
R-squared	0.527503	Mean dependent var		52.55882
Adjusted R-squared	0.480253	S.D. dependent var		28.82464
S.E. of regression	20.78069	Akaike info criterion		9.016056
Sum squared resid	12955.11	Schwarz criterion		9.195628
Log likelihood	-149.2730	Hannan-Quinn criter.		9.077295
F-statistic	11.16415	Durbin-Watson stat		2.187281
Prob(F-statistic)	0.000044			

Pembahasan Hasil Pengaruh E-Government terhadap Korupsi

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4, diketahui bahwa variabel e-Government memiliki nilai probabilitas t statistik sebesar 0,6116 lebih besar dari nilai signifikansi α 0,05, maka variabel tersebut dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel praktik korupsi. Hasil analisis menggambarkan bahwa e-Government tidak berpengaruh terhadap praktik korupsi.

Pengaruh Gaji dan Tunjangan PNS terhadap Korupsi

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4, diketahui bahwa variabel gaji dan tunjangan PNS memiliki nilai probabilitas t statistik sebesar 0,0169 lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel praktik korupsi. Hasil analisis menggambarkan bahwa gaji dan tunjangan PNS berpengaruh terhadap praktik korupsi

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Korupsi

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4, diketahui bahwa variabel PDRB memiliki nilai probabilitas t statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel praktik korupsi. Hasil analisis menggambarkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap praktik korupsi

Pengaruh e-government, gaji dan tunjangan PNS, dan produk domestik regional bruto terhadap korupsi

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa ketiga variabel independen yaitu e-Government, gaji dan tunjangan PNS, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yakni praktik korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji simultan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000044 lebih kecil dari 0,05.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji parsial, maka dapat disimpulkan bahwa e-Government tidak berpengaruh secara parsial terhadap praktik korupsi di pemerintahan Indonesia. Hal tersebut disebabkan baiknya sistem e-Government yang sudah terbentuk pada masing-masing provinsi yang tidak memiliki keterkaitan dengan praktik korupsi.
2. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji parsial, maka dapat disimpulkan bahwa gaji dan tunjangan PNS berpengaruh secara parsial terhadap praktik korupsi di pemerintahan Indonesia. Hal tersebut disebabkan adanya kecukupan gaji dan tunjangan para PNS yang meminimalisir adanya praktik korupsi oleh PNS di masing-masing provinsi.
3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji parsial, maka dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh secara parsial terhadap praktik korupsi di pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan PDRB otomatis sangat minimnya praktik korupsi, dikarenakan adanya pengalokasian dana sesuai dengan anggarannya.
4. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji simultan, maka dapat disimpulkan bahwa e-Government, gaji dan tunjangan PNS, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap praktik korupsi, hal tersebut dibuktikan berdasarkan tahapan praktik korupsi yang dilakukan oleh pada PNS

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Provinsi

Dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan maka pemerintah dari masing-masing provinsi dapat meningkatkan kualitas pemerintahan provinsi. Baik dalam sistem pembaruan pada e-Government yang berguna untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik. Pada gaji dan tunjangan PNS yang memiliki anggaran terbatas, maka setiap pemerintah provinsi dan memberikan lingkungan kerja yang nyaman agar tidak tercipta tindak pidana korupsi bagi para PNS.

2. Bagi Pengadilan Tinggi

Dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan maka pengadilan tinggi dari masing-masing provinsi dapat menindaklanjuti secara tegas oknum praktik korupsi

REFERENSI

- Akbar, Mohammad Reza Hafiz. 2013. Analisis Determinan Ekonomi Korupsi Di Era Desentralisasi Pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Alatas, Syed Hussein. 1999. *Corruption and the destiny of Asia / Syed Hussein Alatas*. Malaysia: Simon & Schuster.
- Ardisasmita, M. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Jakarta, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Clay G Weslatt (15 Agustus 2007). Dalam website.
- Dhevena, Ihsanira. 2018. E-Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi. https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi
- Fariza, Salsa. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Putusan No.47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks). Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar
- Gudono. 2012. Analisis Data Multivariat Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE, 2012.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government in action*. Yogyakarta: Andi Off-set.
- Klitgaard, Robert (1915) dalam Hermoyo. 1998. *Membasmi korupsi/ Robert Klitgaard; penerjemah Hermoyo*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kuncoro, Achmad. 2001. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik, Cetakan Pertama. Bandung: ALFABETA.
- Maria, E. 2017. E-Government dan Korupsi : Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 5, Nomor 1, Maret 2021: 40 – 58*
- Nugroho SBM. 2012. Korupsi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen Vol 26. No 2 Juli 2012*
- Nurindahsari, Risyah., Trisyanto, Rendra. 2022. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E Government Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal Vol. 2, No. 3, June 2022, Pp. 251 – 257*
- Pope, Jeremy. 2003. Strategi memberantas korupsi: elemen sistem integritas nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahayuningtyas, Dwi Prihatni Amrih., Setyaningrum, Dyah. 2017. Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan – Volume 1, Nomor 4, Desember 2017: 431 – 450*
- Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruky, S. Achmad. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia
- Sani, A. 2019. Pengaruh Kenaikan Gaji PNS Terhadap Korupsi Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Studia Administrasi Vol. 2 No. 2*.
- Santoso, Sam. 2003. *The Art of Corruption: Seni Korupsi di Perusahaan*. Jawa Pos Press
- Setyorini, Eny., Astuti, Wuku. 2022. Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ebbank Vol.12 No.01: 49 – 54*
- Silaen, Friska Yuana., Sasana, Hadi. 2013. Analisis Determinan Korupsi Di Era Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-6*
- Soemarso S.R. 2014. *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Kelima. Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro* (eds). 2010. *Revitalisasi Administrasi. Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



- Syamsul., Zuhroh, Siti. 2021. Implementasi E-Government: Dampaknya Pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 5 No. 1
- Takalamingan, Frenky Samuel., Harnovinsah, Lenggogeni. 2022. Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* Vol.9 No.2 September 2022: Hal 161-188
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P Todaro. (2002). *Pembangunan Ekonomi* (Kesembilan). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wibawa, Samodra. 2009. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.